**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penelitian**

Kebijakan Pembangunan serta Pemberdayaan terhadap Masyarakat merupakan serangkaian usaha yang di lakukan secara sadar dan terencana serta berkelanjutan yang dilaksanakan oleh suatu bangsa dengan harapan membawa perubahan dan pertumbuhan guna mempercepat modernisasi kehidupan bangsa dalam rangka pencapaian tujuan akhir bangsa tersebut. Permasalahan yang dihadapi bangsa indonesia yang sejak lama dirasakan sulit untuk diatasi salah satunya adalah masalah pengangguran dan kemiskinan. Upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti program penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Tabungan Keluarga Sejahtera (TAKESRA), dan Kredit Keluarga Sejahtera (KUKESRA). Namun program-program tersebut relatif belum berhasil menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia yang hingga saat ini masih tergolong cukup tinggi.

Pembangunan sebagai suatu kegiatan nyata dan berencana, menjadi menonjol sejak selesainya perang dunia II. Inayatullah mengungkapkan bahwa pembangunan adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungan dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri. Sedangkan hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat indonesia seluruhnya. Hal ini memiliki arti bahwa pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional.

Pelaksanaan pembangunan mancakup aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan bangsa lain yang lebih maju. Oleh karena itu, sesungguhnya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara benar, adil, dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaran negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila.

Pembangunan aspek kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat indonesia bisa terwujud dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Konsep pendidikan nonformal dalam kerangka pembangunan masyarakat dapat dilihat dari dua sisi peran, pertama masyarakat sebagai sumberdaya pembelajaran, dan kedua masyarakat sebagai sasaran pembelajaran. Pemberdayaan masyarakat juga dapat dipahami dengan dua cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdirimasyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggung jawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara given. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumber daya nya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

Setiap masyarakat tentu perlu adanya tokoh masyarakat atau agen perubah sosial sehingga mampu membuat masyarakat menjadi maju dan berkembang. Menurut Chamber dalam Anwas bahwa individu yang diberdayakan adalah orang miskin yang seringkali tidak memiliki daya untuk berjuang karena sudah dilumpuhkan. Oleh karena itu dalam pemberdayaan dibutuhkan peran orang luar. Orang luar ini disebut juga Agent of change yang memiliki tugas untuk memberdayakan adalah kalangan petugas pembangunan baik formal maupun nonformal. Dengan kata lain, tokoh masyarakat dapat juga dikatakan sebagai agen perubahan sosial yang telah memiliki pengalaman dan memiliki kepercayaan oleh setiap anggota masyarakat. Tugas pelaku pemberdayaan adalah mendorong, menciptakan individu serta masyarakat untuk mampu melakukan perubahan perilaku menuju ke arah kemandirian (berdaya). Perubahan perilaku ini baik dari aspek pengetahuan, sikap, mapun keterampilan yang berguna utnuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraannya. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1, ayat (8). Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah dapat membuat masyarakat menjadi mandiri terutama dari kemiskinan dan ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Teori pemberdayaan menempatkan partisipasi di dalam konteks akar rumput (grass root) untuk memahami aset aset yang dimiliki guna mencapai keinginan, bagaimana mereka sejauh ini menangani permasalahannya, aktivitas serta sumber daya lain apa yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan mereka, dan bagaimana keinginan mereka saat ini mampu meningkatkan kemampuannya dalam menciptakan masa depan.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Binong Jati Kecamatan Batununggal. Lokasi ini berada di tempat pemukiman padat penduduk di tengah kota Bandung, selain pemukiman yang padat penduduknya, ditambah banyaknya bangunan yang kurang layak huni, terdapat banyaknya sampah yang menjadi fokus utama berkurangnya keindahan pemukiman ini. Sampah berserakan dimana saja, hampir disetiap lahan kosong sampah plastik terlihat berserakan, bahkan gang kecil pun tidak luput didominasi sampah plastik yang bertebaran menutupi permukaan jalan, dan juga sungai yang melintas memiliki warna yang sudah tercemar yaitu hitam pekat, air yang hanya sedikit mengalir, disumbat oleh sampah-sampah keluarga yang banyak terdapat di bahu sungai maupun di dalam sungainya. Melihat kondisi lingkungan fisik tersebut, muncul kepedulian dari sebagian warga Kelurahan Binong Jati dan Karang Taruna yang memikirkan nasib pembangunannya, pemberdayaan terhadap tetangga nya, dan lingkungannnya.

Melihat fakta dan merasakan langsung dampak pencemaran lingkungan terhadap keberlangsungan hidup masyarakat daerah Kelurahan Binong Jati Kota Bandung, warga jadi semarak untuk bahu – membahu menolong sesama, mengajari dalam hal pendidikan, menjaga lingkungan sekita dan hal – hal yang barmanfaat lainnya, kegiatan yang dilakukan oleh warga adalah konsep yang sudah di gagas oleh banyak orang. Masyarakat sekitar kini mulai menyadari bahwa sampah bisa didaur ulang dan dikelola dengan baik. Perlahan, masyarakat mulai ikut terlibat dalam pengurusan bank sampah. Kini, tumpukan sampah berkurang drastis dengan adanya pemilahan dan pemilihan sampah sesuai dengan jenisnya. Dan saat ini kegiatan pembuatan kerajinan dari sampah ini tidak hanya terfokus di Kelurahan Binong Jati saja tapi hampir di setiap Kelurahan yang berada di ruang lingkup Kecamatan Batununggal mempunyai kelompok nya masing- masing dalam pembuatan kerajinan tersebut. Semua kegiatan warga dalam melakukan dan mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif dalam membangun perekonomian warga sekitarnya sesuai dengan konsep ekonomi kratif yang dipaparkan oleh para ahli, baik nasional maupun internasional.

Permasalahan yang dialami oleh warga Kelurahan Binong Jati pun sama halnya yang dirasakan warga di Kelurahan lainnya yang berada dalam ruang lingkup Kecamatan Batununggal Kota Bandung, yakni Kelurahan Gumuruh, Samoja, Kacapiring, Kebon Waru, Kebon Gedang, Maleer, dan Cibangkong. Kelurahan – kelurahan tersebut juga mengalami hal yang sama dan ada pula yang sedikit berbeda, seperti halnya di Kelurahan Kebon Gedang dan Kebon Waru yang letaknya strategis dengan pasar dan tempat perbelanjaanya, dan ada pula yang terlihat sedikit memilukan pada warganya, yakni banyaknya yang bekerja yang tidak sesuai dengan aktifitas seperti orang – orang yang berkecukupan yaitu menjajakan suara mereka di jalanan yang ramai seperti di perempatan rambu – rambu lalu lintas. Lingkungan yang berada di Kelurahan Kebon Waru dan Kelurahan Kebon Gedang pun sama halnya dengan Kelurahan lainnya yang berada di ruang lingkup Kecamatan Batununggal Kota Bandung seperti Kelurahan Binong Jati, Kelurahan Kacapiring, Kelurahan Samoja, Kelurahan Maleer dan Kelurahan Cibangkong yang tampak sedikit kurang terawat dan harus dibenahi, dan tidak tenggelam juga dalam hal pendidikan dan kreatifitas warga yang kurang dibenahi mungkin dari diri mereka sendiri yang kurang peduli demi pengetahuan mereka. Oleh karena itu Pihak Pemerintah dan Kecamatan Batununggal Kota Bandung seharusnya tegas dan cepat tanggap didalam masalah pendidikan, kemiskinan, kreatifitas, serta pemberdayaan terhadap warga dan semoga menjadi pembelajaran untuk semua komponen bangsa terutama warga dan seluruh jajaran Pegawai Kecamatan Batununggal Kota Bandung agar lebih sigap dalam menanggulangi Permasalahan dalam kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Hasil observasi menunjukan, di Lingkungan Kecamatan Batununggal masih ada sebagian masyarakat yang bersikap apatis, seolah mereka tidak merasa memiliki terhadap program-program pembangunan di daerahnya, selain karena aktifitas yang padat, membuat mereka lebih mengutamakan aktifitas pribadi, mereka juga terkendala dalam hal pengetahuan. Sehingga mereka kurang peduli dan enggan menelusuri setiap informasi terkait dengan program pembangunan yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penjajagan yang telah peneliti lakukan pada Kecamatan Batununggal Kota Bandung ditemukan kenyataanya, bahwa Pemberdayaan Masyarakat masih kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari Indikator – indikator sebagai berikut:

1. Output tidak dapat diukur, yang dimaksud dalam hal ini yakni berkaitan program yang dilaksanakan harus sesuai dengan keadaan di Kecamatan Batununggal Kota Bandung.

2. Penentuan Sasaran, yang dimaksud dalam hal ini adalah menentukan siapa saja yang akan mengalami dalam hal program memberdayakan dan memberikan ilu serta hal yang bermanfaat lainnya agar menunjang kapasitas cara berfikir mereka – mereka yang mengalaminya

3. Konsep Pendampingan, yang dimaksudkan untuk mendampingi warga yang menerima dalam kebijakan dan program – program yang dibuat oleh pihak kecamatan.

Pemberdayaan Masyarakat yang masih rendah pada Kecamatan Batununggal Kota Bandung seperti yang telah diuraikan diatas, salah satunya diduga disebabkan oleh :

1. Kurangnya penguasaan terhadap hal-hal yang bersifat teknis yang diterapkan pada kegiatan operasional (Komputerisasi) Contohnya : Pegawai yang ditugaskan dalam perencanaan yang dibuat di computer nyatanya masih kurangnya kepahaman dalam memakai perangkat tersebut
2. Kurangnya semangat kerja yang tinggi di dalam diri pegawai terhadap pekerjaan.Contohnya : Berdasarkan hasil pengamatan peneliti Masih adanya pegawai Kecamatan Batununggal yang tidak masuk kerja pada saat jam kerja.

Berdasarkan masalah – masalah yang peneliti temui, untuk itu peneliti mengadakan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian yang berjudul :

**“HUBUNGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DENGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BATUNUNGGAL KOTA BANDUNG”**

**B.Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1.Apakah terdapat hubungan antara Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Batununggal Kota Bandung?

2.Faktor – faktor apa saja yang menjadikan hambatan dalam hubungan implementasi kebijakan dengan pemberdayaan masyarakat pada Kecamatan Batununggal Kota Bandung?

3.Usaha – usaha apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan – hambatan dalam hubungan implementasi kebijakan dengan pemberdayaan masyarakat pada Kecamatan Batununggal Kota Bandung?

**C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. TujuanPenelitian**

1. Mengetahui hubungan implementasi kebijakan dengan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Batununggal Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan dengan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Batununggal Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui upaya – upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang timbul dalam implementasi kebijakan dengan pemberdayaan masyarakat pada Kecamatan Batununggal Kota Bandung.

**2. Kegunaan Penelitian**

a. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, memperluas wawasan dalam menerapkan teori – teori implementasi kebijakan yang peneliti peroleh selama kuliah di jurusan administrasi negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.

b. Manfaat Praktis

Secara Praktis, merupakan saran sumbangan pemikiran agar menjadi bahan masukan dan koreksi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan hubungan implementasi kebijakan pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Batununggal Kota Bandung.

**D.Kerangka Pemikiran**

Pada penyusunan proposal penelitian ini, peneliti mengacu kepada pendapat para ahli mengenai teori-teori yang berhubungan dengan locus dan focus penelitian sebagai dasar pedoman yang mengukur sejauh mana pedoman ini sesuai dengan kenyataan di lapangan sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang objektif.

Berikut Peneliti uraikan tentang kerangka pemikiran yang dijadikan titik tolak dalam membahas dan memecahkan masalah, menurut para ahli diantaranya adalah

Menurut **Anderson** yang dikutip oleh **Islamy (2004:17)** mengemukakan bahwa :

**Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.**

Kemudian definisi implementasi kebijakan menurut **Woodrow Wilson** yang dikutip oleh **Riant Nugroho (2014:218)** sebagai berikut :

**Implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai ujuannya, karena struktur hirarki atau kita mungkin menyebutnya sebagai perspektif pelaksana top-down.**

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah adalah merupakan usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, menyelesaikan permasalahan yang ada pada masyarakat sehingga tujuan-tujuan dan dalam implementasi kebijakannya dapat tercapai.

Peneliti akan kemukakan ukuran **implementasi kebijakan** yang akan digunakan dalam menentukan keefektifan implementasi kebijakan menurut **Riant Nugroho (2014:686)** sebagai berikut:

1. **Apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal – hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.**
2. **Tepat pelaksananya. Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah.**
3. **Tepat target. Ketepatan berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi ataukah tidak, Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.**

Peneliti akan mengemukakan pengertian pemberdayaan masyarakat menurut **Wrihatnolo (2007:1)**:

**Pemberdayaan Masyarakat adalah proses perubahan yang bersifat multi dimensi menuju kondisi semakin terwujudnya hubungan yang serasi antara needs and resaurces melalui pengembangan kapasitas masyarakat untuk membangun.**

Berikut Peneliti mengemukakan indikator dari Pemberdayaan Masyarakat menurut Wrihatnolo:

1. Penentuan sasaran. Sasaran yang sangat ditarget adalah yang membutuhkan bantuan baik dari kebijakan itu sendiri atau dari program – program yang telah dibuat.

2. Output tidak dapat diukur. Permasalahan daripada output yakni perencanaan yang tidak dapat diukur.

3. Konsep pendampingan. Pendampingan terhadap warga yang menanggapi program – program yakni salah satunya tentang pemberdayaan guna menunjang kapasitas cara berfikir bagi mereka.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel Bebas (X) Implementasi Kebijakan  Memiliki Ukuran – ukuran sebagai berikut:  1.Apakah kebijakannya sendiri sudah tepat.  2.tepat pelaksananya. Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah  3.Tepat Target. Ketepatan berkenaan dengan tiga hal.  Sumber: Riant Nugroho (2014:686) |  | Variabel Terikat (Y) Pemberdayaan Masyarakat  Memiliki Indikator sebagai berikut:  1. Penentuan sasaran. Sasaran yang sangat ditarget adalah yang membutuhkan bantuan baik dari kebijakan itu sendiri atau dari program – program yang telah dibuat.  2. Output tidak dapat diukur. Permasalahan daripada output yakni perencanaan yang tidak dapat diukur.  3. Konsep pendampingan. Pendampingan terhadap warga yang menanggapi program – program yakni salah satunya tentang pemberdayaan guna menunjang kapasitas cara berfikir bagi mereka  Sumber: Wrihatnolo (2007) |

Gambar Paradigma Hubungan

**E.Hipotesis**

Bertitik tolak dari kerangka pemikiran tersebut diatas, maka peneliti mengajukan sebagai berikut:

**1.Hipotesis Penelitian**

**Terdapat Hubungan yang saling berkaitan antara Implementasi Kebijakan Pembangunan dengan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Batununggal Kota Bandung.**

**2.Hipotesis Statistik**

1. : 0 = Implementasi Kebijakan (X) Pemberdayaan Masyarakat (Y) artinya Hubungan antara Implementasi Kebijakan dengan Pemberdayaan Masyarakat tidak ada pengaruh.
2. : 0 = Implementasi Kebijakan (X) Pemberdayaan ~~Masyarakat (Y) artinya Hubungan antara Implementasi Kebijakan~~ dengan Pemberdayaan Masyarakat terdapat pengaruh.

**Gambar I**

**Paradigma Penelitian**

**Ԑ**

**x y**

X = Implementasi Kebijakan

Y = Pemberdayaan Masyarakat Ԑ=diluar hubungan variabel x dan y

**TABEL 1**

**OPERASIONAL VARIABEL BEBAS**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VARIABEL** | **DIMENSI** | **INDIKATOR** | **ITEM** | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | |
| **1. Variabel Bebas:**  **Implementasi Kebijakan** | a. Ketepatan | 1. kebijakannya sendiri sudah tepat.  2. kebijakannya sudah diteliti lebih jelas. | 1 | |  |
|  | | 2 |
|  | b. Ketepatan Pelaksana | 1. Tepat Pelaksananya. Aktor implementasi kebijakan bukan hanya dari pemerintah saja.  2.Pengalaman dari para penerapan kebijakan. | 3 | |  |
|  | | 4 |
|  | c. Sasaran Kebijakan | 1.Tepat Target. target yang diwawancarai sesuai dengan yang direncanakan.  2. Targetnya sudah dalam kondisi siap yang akan diwawancarai. | 5 |  | |
|  | 6 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

(Sumber:Riant D Nugroho dalam buku Public Policy, 2014)

**TABEL 2**

**OPERASIONAL VARIABEL TERIKAT**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VARIABEL** | **FAKTOR** | **INDIKATOR** | **ITEM** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | |
| 1.**Variabel Terikat**:  ***Pemberdayaan masyarakat*** | a. Skema | 1. Penentuan Sasaran. Sasaran yang sangat ditarget adalah yang membutuhkan.  2. Sasaran bukan dari kalangan kubu lain. | 1 |  |
|  | 2 |
|  | b. Kepelaksanaan | 1. Output tidak dapat diukur. Permasalahan yang tidak dapat diukur.  2. Sasaran kebijakan yang begitu banyak sekali. | 3 |  |
|  | 4 |
| c. Pemberdayaan | 1.konsep Pendampingan. Pendampingan terhadap warga yang menanggapi program – program. | 5 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

(Sumber:Randy R Wrihatnolo dalam bukunya Manajemen Pembangunan Indonesia 2007)

**F. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

**1.Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian Asosiatif, **Sugiyono (2007)** yaitu suatu metode penelitian yang mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, dengan cara mengumpulkan data, kemudian data tersebut di analisis keeratanya dengan menggunakan teknik analisis statistik non parametik berdasarkan koefisiensi korelasi rank spearman.

**2.Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Penelitian Kepustakaan**, yaitu penelitian dengan cara mempelajari buku-buku, teori-teori, catatan-catatan, dokumen-dokumen, yang diperlukan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat data yang di dapat dari lapangan sehingga penelitian mempunyai pegangan dalam memperkuat laporan.
2. **Penelitian lapangan**, terdiri dari :
   1. **Observasi non-partisipan**, yaitu suatu teknik pengumpulan data dan informasi dengan jalan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, namun peneliti tidak terlibat langsung dalam proses kerja yang dilakukan di Kantor Kecamatan Batununggal Kota Bandung
   2. **Wawancara**, yaitu teknik pengumpulan data informasi dengan jalan mengadakan tanya jawab langsung dengan Camat Batununggal Kota Bandung.
   3. **Angket,** yaitu teknik pengumpulan data dan informasi dengan cara menyebarkan sejumlah daftar pertanyaan jenis tertutup, artinya disertai dengan alternaif jawaban guna memperoleh keterangan-keterangan sehubungan dengan masalah yang diteliti kepada pegawai kecamatan batununggal kota Bandung dan warga di sekitar Kecamatan Batununggal tepatnya di beberapa kelurahan yang lebih tepatnya berada di Kelurahan Binong Jati.

**G. Lokasi dan Lamanya Penelitian**

1. Lokasi

Penelitian dilakukan di Kantor Kecamatan Batununggal daerah Kota Bandung, Jalan Venus No.6 Bandung Jawa Barat. Telp (022-7316330) dan di lingkungan Kecamatan Batununggal.

2. Lamanya Penelitian

Lamanya penelitian diadakan selama 6 bulan terhitung dari bulan Desember 2015 sampai awal April 2016 seperti yang tertera di gambar diagram gantt.